

Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik

Implementation of Flood Control Policy in the Kali Lamong River Border area, Gresik Regency

Ach. Apriyanto Romadhan ^{1*}, Ahmad Rusydan Fakhri ², Iradhad Taqwa Sihidi ³
achapriyanto@umm.ac.id¹, fachry@gmail.com², iradhad@umm.ac.id³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

*corresponding author

Dikirimkan: 9-12-2022; Diterima: 23-12-2022; Diterbitkan: 17-01-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7652>

Abstract

This paper explains how flood control is carried out in the Kali Lamong river basin area, Gresik Regency, to overcome flood disasters through the construction of dams. To answer this question, this paper uses the policy implementation theory from Edward III and a qualitative descriptive research method with data collection through interviews, observation, and documentation. Research shows that the implementation has been realized, both seen from the communication carried out by the Great River Basin Office Bengawan Solo (BBWSBS) through the initial stages of communication, the implementation of the socialization of flood control patterns, the implementation of embankment construction, compensation to monthly evaluations to monitor the implementation of policies, as well as competent appropriate resources. in carrying out their duties, a supportive bureaucratic structure and a clear non-overlapping division of authority carried out by BBWS Bengawan Solo so that the implementation of the policy is carried out properly and is free from the annual flood disaster since 2013. Apart from theoretically this research looks at the extent to which the implementation of the policy Flood control carried out by BBWS Bengawan Solo is carried out to reduce the impact of flooding in Gresik Regency through the construction of a dam.

Keywords: Flood, Public Policy, Flood Control, Dam.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bagaimana pengendalian banjir yang dilakukan di kawasan sempadan sungai kali lamong Kabupaten Gresik untuk menanggulangi bencana banjir dengan melalui pembangunan tanggul. Guna menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sudah terealisasi baik dilihat dari komunikasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melalui tahap awal komunikasi terlaksananya sosialisasi pola pengendalian banjir, pelaksanaan pembangunan tanggul, peggantian ganti rugi hingga evaluasi tiap bulanya untuk memonitor pelaksanaan kebijakan, serta sumberdaya yang sesuai kompeten dalam menjalankan tugas, struktur birokrasi yang mendukung dan adanya pembagian kewenangan yang jelas tidak tumpang tindih yang dilakukan oleh BBWS bengawan solo sehingga implementasi kebijakan terlaksana dengan baik dan terbebas dari bencana banjir tahunan sejak tahun 2013. Selain itu secara teoritis dalam penelitian ini melihat sejauh mana implementasi kebijakan pengendalian banjir yang dilakukan BBWS bengawan solo dilaksanakan sebagai mengurangi dampak banjir di kabupaten Gresik melalui pembangunan tanggul.

Keywords: Banjir, Implementasi Kebijakan, Pengendalian Banjir, Tanggul.

1. Pendahuluan

Banjir merupakan permasalahan umum yang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia (Ghozali et al., 2016; Handayani et al., 2019; Kok et al., 2021; Mawandha et al., 2018; Neise & Revilla Diez, 2019; Timmermans et al., 2015; Van Voorst, 2015), terutama di wilayah padat penduduk misalnya di daerah perkotaan (Mawandha et al., 2018; van Voorst, 2016; Widiyanti et al., 2019). Kerugian yang dapat ditimbulkannya cukup besar, baik dari segi materi maupun kerugian jiwa, maka sudah selayaknya permasalahan banjir perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sungai Kali Lamong merupakan salah satu sungai di Jawa Timur dengan posisi hulu di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sedangkan hilirnya berada di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura. Program dan kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Kali Lamong merupakan salah satu tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan- Kawasan Bromo-Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan. Salah satu program pengendalian banjir sungai Kali Lamong yang saat ini sedang dijalankan adalah 'pembangunan tanggul Kali Lamong Gresik. Dengan adanya tanggul, maka limpasan yang seharusnya melimpah ke sisi kanan kiri sungai akan tertahan dan kemungkinan terjadi banjir akan semakin kecil (Setiyowati et al., 2022).

Kawasan Sempadan Sungai (KSS) atau *riparian zone* merupakan suatu kawasan yang berada diantara ekosistem daratan dan sungai, atau dapat dikatakan sebagai zona pembatas. Pada hakikatnya, keberadaan sempadan sungai bukan hanya berperan sebagai pembatas, akan tetapi juga memiliki fungsi penting untuk menjaga stabilitas ekosistem terutama untuk menjamin berfungsinya sungai dengan baik dan berkelanjutan. Kabupaten Gresik merupakan daerah yang dilintasi aliran sungai kali lamong. Pada tahun 2020, diketahui bahwa garis sempadan sungai Kali Lamong kabupaten Gresik hanya berjarak 30m dari palung sungai (Wardiningsih & Fuadi Salam, 2019).

Pemerintah Indonesia secara konstitusional juga telah menetapkan fungsi sungai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Peraturan ini menyebutkan bahwa sungai memiliki dua fungsi utama, yaitu bagi kehidupan manusia dan bagi alam. Dalam konteks kehidupan manusia, sungai berfungsi sebagai sumber atau penyedia air untuk mendukung segala kegiatan dalam kehidupan manusia, mulai dari kegiatan rumah tangga hingga sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik (Zidane, 2020).

Berdasarkan fungsi sungai tersebut di atas, maka sangat penting untuk menjaga adanya kawasan sempadan sungai (KSS) agar fungsi sungai dapat berjalan dengan baik. Jika sungai

dapat berfungsi sebagai media penyalur banjir, maka sempadan sungai juga memiliki fungsi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana alam, terutama erosi. Dikatakan demikian, karena akar tumbuhan yang tumbuh di kawasan sempadan sungai menjadikan struktur tanah menjadi lebih kuat, sehingga tanah tidak mudah tergerus.

Pada realitasnya, saat ini kawasan sempadan sungai mulai banyak yang berkurang akibat adanya alih fungsi lahan bagi peruntukan lain, seperti pemukiman, kawasan pabrik dan industri, hingga menjadi kawasan pariwisata. Berkurang bahkan hilangnya kawasan sempadan sungai tentu memberikan dampak buruk, baik bagi kehidupan, alam, maupun pengurangan fungsi sungai (Sulistyaningsih et al., 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan luas garis sempadan sebesar 70m akibat adanya pelanggaran garis sempadan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak pabrik dan industri. Apabila ditelaah lebih jauh, pelanggaran garis sempadan ini sering terjadi karena pemilik lahan dengan sengaja mengabaikan peraturan tentang kewajiban untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum melakukan pembangunan. Adapun pola pengendalian banjir sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 550/KPTS/M/2015 yaitu upaya pengendalian banjir jangka pendek dan jangka Panjang yaitu dengan pembangunan tanggul, Pada Pasal 16 Perda Kabupaten Gresik No.8/2011 (Zidane, 2020)

Hingga tahun 2020, tercatat sebanyak 1.300 bangunan dan 17 unit industri yang berada di kawasan sempadan sungai Kali Lamong. Kondisi demikian tentu berdampak buruk terhadap tidak optimalnya fungsi sempadan sungai sebagai pembatas antara sungai dan daratan, sehingga menyebabkan meluapnya air banjir ke pemukiman warga. Berikut data kecamatan dan desa yang terdampak banjir akibat berkurangnya luas garis sempadan sungai Kali Lamong.

Tabel 1. Jumlah Daerah Terdampak Banjir

No	Tahun	Jumlah Daerah Terdampak
1	2017	3 Kecamatan 7 Desa
2	2018	3 Kecamatan 13 Desa
3	2019	4 Kecamatan 21 Desa
4	2020	4 Kecamatan 21 Desa

Sumber: Analisis penulis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa daerah yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Kali Lamong terus-menerus bertambah. Peningkatan daerah terdampak banjir ini menunjukkan bahwa kondisi kawasan sempadan sungai Kali Lamong sudah memasuki kondisi kritis dan perlu tindakan pemulihan untuk mengembalikan optimalisasi

fungsi kawasan sempadan sungai dan fungsi sungai Kali Lamong itu sendiri. Adapun dampak yang paling besar dari berkurang atau hilangnya kawasan sempadan sungai adalah terjadinya banjir, karena tidak ada lagi pembatas antara sungai dan daratan, sehingga aliran air berlebih yang tidak dapat ditampung oleh sungai dapat meluap ke daratan, menjadi genangan dan selanjutnya berubah menjadi banjir yang tentunya merugikan kehidupan manusia dan alam.

Seiring dengan itu juga Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWBS) yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum daerah sungai bengawan solo melaksanakan kebijakan pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul. BBWSBS dituntut untuk lebih tanggap melindungi dan melayani kepentingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah seutuhnya, memerhatikan kondisi sarana pengendalian banjir dan saluran drainase, gorong-gorong. Hal ini penting dilakukan terutama dengan datangnya musim penghujan menjadi isu strategis karena hampir seluruhnya dalam Kota Gresik terdapat titik-titik genangan air yang dapat menimbulkan terjadinya bencana banjir.

Di Indonesia, belum ada penelitian secara spesifik melihat Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik Melalui Pembangunan Tanggul. Beberapa studi fokus di lokasi lain dengan pendekatan yang berbeda seperti di Desa Pontolo (Apriani et al., 2016), Kelurahan Gandus Kota Palembang (Andayani et al., 2015), Seulah Kota Langsa (Ningrum & Ginting, 2020), Kota Semarang (Suliyati, 2014), Wilayah Pesisir Kota Pekalongan (Ramadhanni, 2015), Desa Pulosari Kabupaten Demak (Safitri et al., 2017), Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah (Asrofi et al., 2017), Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda (Pongtuluran & Jayadi, 2018), Kabupaten Sidrap (Qadri et al., 2016) dan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" (Eato et al., 2017).

Dengan demikian penelitian ini akan melihat implementasi Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik Melalui Pembangunan Tanggul dengan menggunakan teori Edward III sebagai analisis dengan empat tahapan dalam implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Implementasi ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) selaku instansi yang berwenang dalam hal pengelolaan kawasan sempadan sungai harus menetapkan upaya pemulihan kawasan sempadan sungai. Seperti telah dibuktikan diberbagai studi (Alhawariy, 2021; Maharani et al., 2016; Mangkuto & Widiyanto, 2019; Pekuwali et al., 2017; Rejbiani et al., 2019; Putro & Sihidi, 2020; Rachmawati et al., 2022; Mahbubah et al., 2021) bahwa imlementasi merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan dalam kebijakan karena

itu artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di Kali Lamong.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Creswell penerapan metode penelitian kualitatif ini dimulai dengan asumsi, penafsiran/teoritis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2015). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden wawancara ditentukan dengan purposive sampling sehingga dilakukan dengan Bapak Ir. Isgiyanto, MT (Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSBS), Sugeng Wiratna, ST., MT (Kepala Subkoordinator Pelaksana Tugas Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai) dan R. Panji Satrio, ST., MT., MDM (Kepala SNVT PJSB BBWSBS). Dokumen yang didapatkan berupa Peraturan daerah no 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Gresik tahun 2010-2030 dan dokumen kegiatan BWSS Bengawan Solo.

Adapun semua data dianalisis dengan beberapa tahap. Pertama, pengumpulan data. Kedua, reduksi data. Ketiga, penyajian data. Keempat, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul yang dilaksanakan di DAS Kali Lamong, maka komunikasi dilakukan oleh BBWSBS dengan beberapa pihak, baik antar lembaga, staf pelaksana, hingga masyarakat di DAS Kali Lamong Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BBWSBS dapat dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

a) Komunikasi

Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BBWSBS dapat dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

1) Sosialisasi di Hilir Madiun - Gresik

Sosialisasi ini merupakan tahapan pertama yang dilaksanakan oleh BBWSBS terkait dengan rencana pengendalian banjir disepanjang DAS Kali Lamong. Sosialisasi yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 28 April ini fokus menyampaikan terkait dengan pola pengendalian banjir. Adapun pola pengendalian banjir sendiri artinya rancangan atau model yang akan digunakan untuk mengendalikan banjir. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pola yang digunakan untuk menanggulangi banjir di sepanjang DAS Kali Lamong yaitu dengan melakukan pembangunan tanggul.

Oleh karena itu, pola pengendalian ini disampaikan langsung oleh BBWSBS kepada Pemerintah Daerah yang terlibat, mulai dari Pemerintah Lamongan, Madiun hingga Gresik. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan agar Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan selama pelaksanaan program pengendalian berlangsung.

2) Sosialisasi Penanganan Banjir di DAS Kali Lamong

Sosialisasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan penanganan banjir yang dikhususkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini diselenggarakan karena wilayah Gresik merupakan wilayah yang paling terdampak dan mendapatkan kerugian paling banyak setiap kali terjadi banjir karena luapan air Kali Lamong. Oleh karena itu, BBWSBS menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik bahwa pengendalian banjir di wilayah Gresik tidak hanya dilakukan dengan pembangunan tanggul, akan tetapi juga ditambah dengan pembangunan parapet beton yang akan dipasang disepanjang Kali Lamong.

Tujuan dari pembangunan parapet beton ini adalah untuk meminimalisir terjadi luapan air dari sungai serta meminimalisir terjadi longsor dan kerusakan parah apabila luapan air meluap ke area pemukiman warga yang berada disepanjang DAS Kali Lamong. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi ini maka Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik dapat melakukan persiapan, terutama berkaitan dengan biaya tambahan untuk pembangunan parapet beton.

3) Koordinasi Perencanaan Pengendalian Banjir

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh BBWSBS dengan seluruh Pemerintah Daerah yang terlibat, terutama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 ini diselenggarakan untuk mengetahui perkembangan terkait dengan kegiatan pengendalian banjir yang telah disiapkan oleh masing-masing pihak.

Melalui kegiatan ini, diketahui bahwa persiapan seluruh pihak untuk menjalankan program pengendalian tersebut sudah selesai, baik terkait dengan pembagian tugas dan wewenang, penunjukan pelaksana kegiatan (kontraktor), hingga anggaran biaya yang diperlukan. Setelah tahap persiapan selesai, maka program dapat segera dilaksanakan.

4) Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir

Pengerjaan program pembangunan tanggul dan parapet beton di DAS Kali Lamong mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021. Sepanjang pelaksanaan program tersebut, maka BBWSBS juga melaksanakan kegiatan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat,

Tujuan dari adanya kegiatan koordinasi ini adalah untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Di samping itu, melalui kegiatan koordinasi, BBWSBS juga dapat memberikan solusi apabila terjadi kendala atau hambatan di lapangan.

5) Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring pelaksanaan ini dilaksanakan oleh BBWSBS dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang terlibat didalam program pengendalian banjir di DAS Kali Lamong. Monitoring yang dilaksanakan setiap sebulan sekali ini diselenggarakan untuk mengetahui perkembangan program yang dilaksanakan. Pertemuan ini juga diselenggarakan untuk mengambil atau menyepakati keputusan atau kebijakan terkait dengan kendala utama di lapangan, salah satunya yaitu terbatasnya anggaran biaya untuk pelaksanaan program. Sebab pembangunan melibatkan banyak pihak, maka keputusan juga harus diambil dengan melibatkan seluruh pihak sehingga pembangunan juga dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Adanya kegiatan komunikasi seperti tersebut diatas, pada dasarnya dapat mencegah terjadinya miss information antara pihak-pihak terkait. Edward juga mengatakan bahwa terdapat 3 indikator yang dapat menjadi tolak ukur dalam komunikasi yang dilakukan, yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, serta konsistensi informasi. Ketiga indikator ini dijelaskan sebagai berikut :

1) Transmisi

Sosialisasi kebijakan pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul yang dilakukan oleh BBWSBS dengan Dinas PUTR Kabupaten Gresik telah dilaksanakan sejak tahapan perencanaan kegiatan yaitu pada awal tahun 2020 hingga pelaksanaan pembangunan yang dimulai pada februari 2021. Selama proses perencanaan hingga saat ini, kegiatan sosialisasi juga diiringi dengan koordinasi secara insentif yang dilakukan rutin setiap bulan oleh BBWSBS dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pengendalian banjir dapat dimonitoring oleh kedua belah pihak, sehingga dapat meminimalisir kegagalan dalam proses implementasi

2) Kejelasan Informasi

Dalam pelaksanaan pengendalian banjir di DAS Kali Lamong, maka informasi pertama yang harus jelas adalah siapa aktor yang berhak untuk mengimplementasikan kebijakan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 550/KPTS/M/2015 tentang upaya pengendalian banjir jangka pendek dan jangka panjang melalui pembangunan tanggul, maka

apabila pembangunan dilakukan didaerah kawasan sungai, maka yang berhak untuk melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Apabila dikaitkan dengan kajian penelitian, maka BBWS yang dimaksud yaitu BBWS Bengawasan Solo. Meskipun diberikan kewenangan secara langsung dalam aturan perundang-undangan, BBWSBS tetap harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Informasi kedua yang harus diketahui kejelasannya yaitu berkaitan dengan payung hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan pengendalian banjir di DAS Kali Lamong yang dilakukan oleh BBWSBS berpedoman pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Dengan berpedoman pada perda ini, maka alur legalitas pelaksanaan program jelas dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya

3) Konsistensi perintah

Pada realisasi di lapangan, BBWSBS selaku aktor pelaksana sudah konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian banjir sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam kegiatan tersebut dan sudah sesuai dengan Rencana kerja pengendalian banjir antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang pengendalian banjir. Penguatan peran masyarakat dalam mendorong partisipasi dilakukan dengan menggali peluang aspek wisata yang disinkronisasi dengan rencana pembangunan Kabupaten Gresik. Proses pembangunan wisata sudah terjalin dalam rencana pembangunan wisata yang mengoptimalkan potensi wilayah yang dapat digunakan tempat wisata (Hariyoko et al., 2021).

b) Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam sebuah program kebijakan, karena menjadi kekuatan utama agar program kebijakan tersebut dapat terlaksana. Adapun sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun finansial. Dalam hal ini maka dapat dilihat dari ketersediaan staf pelaksana program baik dari segi kuantitas dan kualitas, serta ketersediaan anggaran untuk merealisasikan program pengendalian banjir di DAS Kali Lamong, Sumber daya sendiri terbagi lagi menjadi 3 item dalam penjelasan edward III yaitu :staf, sumber informasi,pembagian wewenang, fasilitas pendukung yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Staf

Implementor kebijakan pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di DAS Kali Lamong dilaksanakan oleh Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSBS. Pemilihan staf

pelaksana dari bidang ini sejalan dengan pembagian tugas dan kewenangan di lingkungan kerja BBWSBS sesuai dengan surat peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai.

Berdasarkan pada peraturan tersebut dan sejalan dengan lokasi pembangunan yang berada di wilayah sungai Bengawan Solo, maka BBWSBS merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kementerian untuk melaksanakan program. Sejalan dengan adanya kewenangan dari kementerian, maka BBWSBS juga berhak untuk mendelegasikan kewenangannya kepada bidang yang bersangkutan sebagai staf pelaksana, dalam hal ini yaitu Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air.

Keputusan BBWSBS untuk menunjuk staf pelaksana dari Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air merupakan keputusan yang tepat, karena bidang ini bertanggungjawab atas tugas dan fungsi dalam pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi yang berkaitan dengan jaringan sumber air, termasuk dalam hal ini pembangunan tanggul yang digunakan untuk meminimalisir banjir di kawasan DAS Kali Lamong.

2) Sumber Informasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan program pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul, BBWSBS menyediakan informasi program secara transparansi bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan jalannya program tersebut, terutama bagi Pemerintah kabupaten Gresik maupun bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam program tersebut.

Informasi mengenai program ini juga tersedia secara umum bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang bagaimana perkembangan pembangunan tanggul dalam mengatasi banjir di DAS Kali Lamong dan dapat diakses secara online melalui website resmi BBWSBS (<https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/>). Dengan mengklik tautan tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh BBWSBS untuk merealisasikan program tersebut.

Sumber informasi juga tersedia secara langsung, akan tetapi bersifat terbatas. Artinya BBWSBS dapat menyampaikan informasi secara langsung (tatap muka) seperti berdiskusi, berdialog, rapat koordinasi dan jenis kegiatan tatap muka lainnya, akan tetapi hanya bagi pihak-pihak tertentu seperti dilaksanakannya koordinasi rutin dengan Pemerintah Kabupaten Gresik beserta Dinas PUTR dalam rangka menyeleraskan pemahaman agar program tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

3) Pembagian Wewenang

Pengendalian banjir ini dilaksanakan oleh BBWSBS sebagai pelaksana kebijakan akan tetapi juga memerlukan koordinasi dari beberapa pihak juga, bahwa program ini melibatkan 3 pihak utama, yaitu BBWSBS, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik dengan pembagian peran sebagaimana terlampir dibawah ini.

Aktor pertama yaitu BBWSBS memiliki kewenangan sebagai eksekutor kebijakan, dalam arti khusus yaitu melakukan pembangunan fisik tanggul, mulai dari desain konstruksi hingga bangunan fisik tanggul selesai. Dalam menjalankan wewenangnya BBWSBS juga dapat bekerjasama dengan perusahaan konstruksi untuk memudahkan proses pembangunan.

Aktor yang kedua yaitu Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembebasan lahan bersama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Gresik serta melakukan normalisasi kali kecil yang ada di jalur DAS Kali Lamong untuk sementara agar tidak terjadinya genangan air selama proses pembangunan dilaksanakan. Pembebasan lahan yang dimaksud dilaksanakan karena lahan yang menjadi lokasi pembangunan tanggul adalah lokasi pemukiman warga sehingga memerlukan adanya relokasi dan ganti rugi atas tanah yang dimiliki secara pribadi oleh warga.

Adapun aktor yang ketiga yaitu Dinas PUTR Kabupaten Gresik memiliki kewenangan sebagai koordinator daerah yang ditunjuk secara langsung oleh Kementerian PUPR dalam pelaksanaan kebijakan dan membantu dalam proses sosialisasi pengendalian banjir pada warga terdampak .

4) Fasilitas Pendukung

Pada konteks implementasi program pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di DAS Kali Lamong ini, maka fasilitas yang dibutuhkan yaitu peralatan-peralatan konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun tanggul Meskipun demikian, karena program pembangunan ini dijadikan bagian dari proyek lelang oleh Kementerian PUPR, maka segala fasilitas yang digunakan untuk pembangunan tanggul disediakan oleh pemenang lelang yaitu PT. Marinda Utamakarya Subur .

Adapun dalam rangka menunjang kegiatan, BBWSBS, Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Dinas PUTR juga menyediakan fasilitas berupa aula atau ruang rapat untuk kebutuhan rapat, diskusi maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta mobil operasional yang digunakan untuk meninjau (survei) proyek pembangunan.

c) Disposisi

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Edward III, program pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di DAS Kali Lamong tentunya membutuhkan disposisi dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari BBWSBS, Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas PUTR,

hingga masyarakat di lokasi tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, peneliti dapat melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas PUTR dan masyarakat sangat mendukung program ini.

Tindakan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap lahan yang dimiliki secara pribadi oleh warga dengan sistem ganti rugi juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik bersikap demokratis, dimana pemerintah tetap meletakkan kepentingan, kenyamanan dan keamanan masyarakat diatas kepentingan pembangunan, serta untuk menghindari terjadi konflik lahan antara Pemerintah dengan masyarakat.

Edward III mengatakan bahwa terdapat variabel dalam disposisi yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu adanya pengangkatan birokrasi:

Dalam proses implementasi kebijakan program pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di DAS Kali Lamong, diketahui bahwa tidak ada pengangkatan birokrasi (yang baru). Hal ini terjadi karena staf pelaksana dari Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air yang ditunjuk sebelumnya telah memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu melaksanakan kebijakan dengan baik.

d) Struktur Birokrasi

Dalam keberhasilan tercapainya implemetasi kebijakan maka untuk meningkatkan keberhasilan dalam program pengendalian banjir di DAS Kali Lamong dibutuhkan adanya struktur birokrasi yang jelas sehingga pendelegasian kewenangan juga dapat berjalan dengan baik. Untuk mendukung kinerja struktur birokrasi dan menjadikan organisasi menjadi lebih baik yaitu adanya fragmentasi.

Dalam implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di DAS Kali Lamong, maka tanggungjawab dibagi kepada 3 aktor utama, yaitu BBWSBS, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas PUPR. Meskipun sesuai aturan dari Kementerian PUPR yang berwenang melaksanakan kebijakan adalah BBWSBS, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pembagian tanggung jawab maka akan mempermudah proses implementasi program dan menghindari terjadinya konflik antar lembaga yang dapat berdampak pada tidak terealisasinya program pengendalian banjir di DAS Kali Lamong.

e) Realisasi Pembangunan Tanggul

Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, BBWSBS dan Dinas PUPR Kabupaten Gresik. Keberhasilan

dalam mengimplementasikan kebijakan di atas didukung dengan data lapangan tentang realisasi pembangunan tanggul di DAS Kali Lamong Kabupaten Gresik. Adapun data realisasi yang dimaksud sebagai berikut:

NO	LOKASI	RENCANA	REALISASI		
B	KALI LAMONG	2054 m			
1	DESA SUMBEREJO 1 KOTA SURABAYA	300 m			
	- TITIK PANCANG	200 titik	200 titik		100%
	- FLAT SHEET PILE	600 unit	600 unit		100%
	- PARAPET WALL	300 m	300 m		100%
2	DESA SUMBEREJO 2 KOTA SURABAYA	204 m			
	- TITIK PANCANG	136 titik	0 titik		0%
	- FLAT SHEET PILE	408 unit	0 unit		0%
	- PARAPET WALL	204 m	0 m		0%
3	DESA TAMBAK BERAS KAB. GRESIK	1080 m			
	- TITIK PANCANG	720 titik	612 titik		85%
	- FLAT SHEET PILE	2169 unit	1753 unit		81%
	- PARAPET WALL	1080 m	720 m		67%
4	DESA JONO 1 KAB. GRESIK	420 m			
	- TITIK PANCANG	280 titik	280 titik		100%
	- FLAT SHEET PILE	840 unit	840 unit		100%
	- PARAPET WALL	420 m	408 m		97%
4	DESA JONO 2 KAB. GRESIK	50 m			
	- TANGGUL TANAH	50 m			0%
5	PINTU AIR				
	- TITIK PANCANG	10 titik	10 titik		100%

Gambar 1. Rencana dan Realisasi Pembangunan Tanggul Kali Lamong (Sumber: BBWS 2021)

Mengacu kepada gambar di atas, maka realisasi pembangunan tanggul DAS Kali Lamong hingga pada akhir tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 1.428 meter atau dengan presentasi sebesar 77.07%, yang didapat dari hasil perhitungan data di lapangan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Tanggul Kali Lamong

No	Satuan	Rencana		Realisasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meter	2.054	100	1.428	69,52
2	Titik	1.346	100	1.102	82,23
3	Unit	4.017	100	3.913	79,48
Persentase Totsal			100		77,07

Sumber: Analisis penulis 2021

Sejalan dengan hasil perhitungan realisasi di atas, diketahui bahwa pembangunan tanggul DAS Kali Lamong sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kabupaten Gresik masih tersisa sebesar $\pm 30\%$. Selanjutnya, belum terealisasi pembangunan tanggul sesuai dengan rencana (100%) diakibatkan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan belum tercapainya target pembangunan secara maksimal.

Meskipun belum terealisasi secara penuh, Pemerintah Kabupaten Gresik beserta dengan seluruh pihak yang terlibat tetap memegang komitmen dan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan sisa pembangunan serta mengupayakan berbagai cara untuk memecahkan hambatan yang terjadi, sehingga pembangunan tanggul sebagai upaya penanggulangan banjir di DAS Kali Lamong dapat terealisasi secara maksimal.

Berisi mengenai hasil statistik deskriptif, uji asumsi, dan analisisnya. Tabel dan/atau gambar harus bermakna dan mudah untuk dimengerti serta sebaiknya ditempatkan di akhir naskah, tidak di dalam teks. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan kutipan langsung hasil wawancara dengan narasumber.

4. Simpulan

Dalam Implementasi kebijakan pengendalian banjir dikabupaten Gresik dengan melalui pembangunan tanggul dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan Edward III yakni Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berjalan dengan baik. Ini juga diperkuat dengan fakta bahwa dalam realisasi kebijakan pengendalian banjir di kabupaten Gresik hingga pada akhir tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 1.428 meter atau dengan presentasi sebesar 77.07% di desa Tambak Beras dan desa Jono kabupaten Gresik

Namun demikian tetap perlu ada perbaikan kedepannya. Kebijakan pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul tersebut walaupun sudah terlaksana namun masih terdapat beberapa wilayah belum terlaksana dikarenakan terkendala pembebasan lahan. Karena itu pemerintah pusat melalui Balai besar wilayah sungai BBWSBS dan pemerintah kabupaten Gresik harus segera menyelesaikan tersebut secepatnya agar permasalahan banjir tahunan di kabupaten Gresik tidak terjadi lagi

5. Referensi

- Alhawariy, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 62–81. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5171/3622>
- Andayani, R., Djohan, B., & Arlingga, K. A. (2015). *PENANGANAN BANJIR DENGAN KOLAM RETENSI (RETARDING BASIN) DI KELURAHAN GANDUS KOTA PALEMBANG Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik – UTP Kata kunci : Banjir , Kolam Retensi , HSS Nakayasu , Pintu Romijn Abstract : Flooding is a natural disaster that.* 27–33.
- Apriani, Rachman, A., & Alitu, A. (2016). STUDI PENANGANAN BANJIR DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI DESA PONTOLO. *RADIAL – JuRnal PerADaban SaIns, Rekayasa Dan TeknoLog*, 6(1), 84–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.37971/radial.v6i1.167>
- Asrofi, A., Hardoyo, S. R., & Sri Hadmoko, D. (2017). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.26257>
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Gramedia pustaka utama.

- Eato, S. D. K. H., M.Rengkung, M., & Johannes Van Rate. (2017). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Spasial*, 4(3), 108–120.
- Ghozali, A., Ariyaningsih, Sukmara, R. B., & Aulia, B. U. (2016). A Comparative Study of Climate Change Mitigation and Adaptation on Flood Management between Ayutthaya City (Thailand) and Samarinda City (Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 424–429. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.096>
- Handayani, W., Fisher, M. R., Rudiarto, I., Sih Setyono, J., & Foley, D. (2019). Operationalizing resilience: A content analysis of flood disaster planning in two coastal cities in Central Java, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 35. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101073>
- Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Pangestuti, R. P. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 44–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.11745>
- Kok, S., Bisaro, A., de Bel, M., Hinkel, J., & Bouwer, L. M. (2021). The potential of nature-based flood defences to leverage public investment in coastal adaptation: Cases from the Netherlands, Indonesia and Georgia. *Ecological Economics*, 179(August 2020), 106828. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106828>
- Maharani, W. M., Wati, D. M., & Balitar, U. I. (2016). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan Di Provinsi Jawa Timur. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 89–106.
- Mahbubah, N. L., Rizki, M. F., & Atthahara, H. (2021). Community Development as Disaster Risk Reduction Efforts through the Disaster Resilient Village (Destana) Program in Nganjuk Regency. *Journal of Local Government Issues*, 4(1), 60–76. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.13116>
- Mangkuto, A. R., & Widiyanto, M. K. (2019). Implementasi Kebijakan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1226–1231. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/2963>
- Mawandha, H. G., Wignyosukarto, B. S., & Jayadi, R. (2018). Mini Polders as Alternative Flood Management in the Lower Bengawan Solo River, Indonesia. *Irrigation and Drainage*, 67, 72–80. <https://doi.org/10.1002/ird.2198>
- Neise, T., & Revilla Diez, J. (2019). Adapt, move or surrender? Manufacturing firms' routines and dynamic capabilities on flood risk reduction in coastal cities of Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33, 332–342. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.10.018>
- Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. (2020). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Geography Science Education Journal (GEOSEE)*, 1(1), 6–13.
- Pekuwali, P., Indartuti, E., & Zakariya, Z. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan (Studi Di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 864–886.

<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1267>

- Pongtuluran, E. H., & Jayadi, R. (2018). Peningkatan Kinerja Drainase Untuk Penanganan Banjir Menggunakan Sumur Resapan (Studi Kasus Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda). *RENOVASI: Rekayasa Dan ...*, 15–26.
- Putro, B. N., & Sihidi, I. T. (2020). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Batu Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 310–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4210>
- Qadri, W., Sholichin, M., & Sisingsih, D. (2016). Studi Penanganan Banjir Sungai Bila Kabupaten Sidrap. *Jurnal Teknik Pengairan*, 7(2), 277–288.
- Rachmawati, D., Nurjaman, A., & Sihidi, I. T. (2022). Implementation of E-Voting in the Village Head Election (Pilkades) Selotinatah , Ngariboyo District , Magetan Regency. *Journal of Public Policy*, 8(1), 23–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.3812>
- Ramadhanni, R. F. (2015). Implementasi Program Penanganan Banjir Rob Di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 261–270.
- Rejbiani, A. G., Hakim, L., & Azijah, D. N. (2021). Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Sukadaya Kabupaten Bekasi. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 12–26.
- Safitri, A. R., Deviar, A., Suharyanto, & Adi, R. Y. (2017). Kajian Penanganan Banjir Sungai Tuntang Di Desa Pulosari Kabupaten Demak. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6(4), 345–356.
- Setiyowati, Y. A., Sholichin, M., & Prayogo, T. B. (2022). Studi Kelayakan Pengadaan Tanah guna Penanggulangan Banjir pada Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik. 2(1), 182–192.
- Sulistyaningsih, T., Nurmandi, A., Salahudin, S., Roziqin, A., Kamil, M., Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., & Loilatu, M. J. (2021). Public policy analysis on watershed governance in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126615>
- Suliyati, T. (2014). Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya. *HUMANIKA*, 19(1), 59–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.19.1.59-69>
- Timmermans, K., Vaneker, M., Scheffer, G. J., Maassen, P., Janssen, S., Kox, M., & Pickkers, P. (2015). Soluble urokinase-type plasminogen activator levels are related to plasma cytokine levels but have low predictive value for mortality in trauma patients. *Journal of Critical Care*, 30(3), 476–480. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2015.01.006>
- van Voorst, R. (2016). Formal and informal flood governance in Jakarta, Indonesia. *Habitat International*, 52, 5–10. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.023>
- Van Voorst, R. (2015). Applying the risk society thesis within the context of flood risk and poverty in Jakarta, Indonesia. *Health, Risk and Society*, 17(3–4), 246–262. <https://doi.org/10.1080/13698575.2015.1071785>
- Wardiningsih, S., & Fuadi Salam, B. (2019). PERENCANAAN RTH SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG DI KAWASAN KAMPUNG PULO DAN BUKIT DURI JAKARTA. *NALARs*, 18(1), 65–74.

- Widiyanti, D., Djannatun, T., Astuti, I. I. P., & Maharsi, E. D. (2019). Leptospira detection in flood-prone environment of Jakarta, Indonesia. *Zoonoses and Public Health*, 66(6), 597–602. <https://doi.org/10.1111/zph.12610>
- Zidane, I. (2020). ANALISIS SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG, KELURAHAN BUKIT DURI, JAKARTA SELATAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU. *KOCENIN SERIAL KONFERENSI*, 1(1), 2–4.